

## PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN PANDEGLANG

Deris Desmawan<sup>1</sup>, Elsa Halwatunnisa<sup>2</sup>, M Rayhan Syahputra<sup>3</sup>, Sania<sup>4</sup>, Bunga Pratiwi<sup>5</sup>, Sayidah Humairoh<sup>6</sup>, Risqi Firmansyah<sup>7</sup>

[5553240013@student.untirta.ac.id](mailto:5553240013@student.untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [5553240001@untirta.ac.id](mailto:5553240001@untirta.ac.id)<sup>2</sup>,  
[5553240005@untirta.ac.id](mailto:5553240005@untirta.ac.id)<sup>3</sup>, [5553240007@untirta.ac.id](mailto:5553240007@untirta.ac.id)<sup>4</sup>, [5553240013@untirta.ac.id](mailto:5553240013@untirta.ac.id)<sup>5</sup>,  
[5553240023@untirta.ac.id](mailto:5553240023@untirta.ac.id)<sup>6</sup>, [5553240026@untirta.ac.id](mailto:5553240026@untirta.ac.id)<sup>7</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ABSTRAK

Industri pertanian di Indonesia memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena beraneka ragamnya jenis pangan yang dihasilkannya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh gizi yang cukup. Kegiatan langsung meliputi upaya berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif yang terpadu, terukur, dan berjangka panjang; kegiatan tidak langsung meliputi perluasan industri lain; dan secara bersama-sama, kegiatan tersebut merupakan bentuk keterlibatan pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan. 2) Dinas Pangan memiliki kendali penuh atas pasokan pangan Pandeglang dan dapat memperkirakan kapan beras akan kekurangan pasokan dengan mengimpornya dari daerah lain. Untuk lebih mendalami keterlibatan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang Selatan, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan mengandalkan informan yang dipilih secara cermat yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti memilih informan penelitian dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka akan memberikan kontribusi terhadap simpulan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah individu yang secara aktif berupaya mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang Selatan. Peneliti berharap mereka dapat memberikan jawaban terkait ketahanan pangan yang diteliti. Mereka mengelompokkan sumber informasi sebagai informan sekunder dan informan utama. Sebaliknya, peneliti mengandalkan masyarakat dan organisasi petani sebagai sumber atau informan sekunder. Penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan di Pandeglang telah mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem pengawasan mungkin perlu beberapa penyesuaian, seperti penilaian yang lebih berkala dan inspeksi mendadak, untuk lebih memantau masalah di lapangan, mengidentifikasi penyebabnya, dan menerapkan perbaikan.

**Kata kunci:** Ketahanan Pangan, Kebijakan Pemerintah, Evaluasi Kebijakan.

### ABSTRACT

*The agricultural industry in Indonesia plays an important role in meeting people's food needs because of the various type of food it produces. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees everyone's right to obtain adequate nutrition. Direct activities include the government's ongoing efforts to improve food security through various integrated, measurable and long-term initiatives; indirect activities include expansion of other industries; and together, these activities are a form of government involvement in ensuring food security. The Food Service has full control over Pandeglang's food supply and can predict when rice will be in short supply by importing it from other areas. To further explore the government's involvement in achieving food security in South Pandeglang Regency, this research uses qualitative research techniques and relies on carefully selected informants who can answer the research questions. Researchers choose research informants carefully to ensure that they will contribute to the research conclusions. The key informants in this research are individuals who are actively trying to achieve food security in South Pandeglang Regency. Researchers hope they can provide answers regarding the food security being studied. They group information sources as secondary informants and primary informants. Instead, researchers rely on the community and farmer organizations as secondary sources or*

*informants. Research also shows that the government's efforts to ensure food security in Pandeglang have followed established steps. Additionally, monitoring systems may need some adjustments, such as more regular assessments and unannounced inspections, to better monitor problems in the field, identify their causes, and implement fixes.*

**Keywords:** Food Security, Government Policy, Policy Evaluation.

## PENDAHULUAN

Sebagai penghasil berbagai jenis pangan, industri pertanian Indonesia memegang peranan penting dalam menyediakan pangan yang dibutuhkan penduduk negara ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia menjamin hak warga negaranya untuk memperoleh gizi yang cukup. Dalam skala nasional dan regional, negara harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap pangan yang sehat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan gizi mereka tanpa mengurangi keamanan, kualitas, kuantitas, atau keseimbangan. Karena jumlah penduduknya yang besar dan sumber daya alamnya yang beragam, Indonesia perlu memastikan ketahanan pangannya sendiri dan memenuhi permintaan pangannya sendiri. Salah satu tujuan pembangunan dan salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian, yang memiliki dua tujuan. Dalam rangka "kemampuan negara untuk menyediakan pangan bagi warga negaranya yang memenuhi kebutuhan gizi secara terjangkau, mudah diperoleh, sesuai dengan budaya dan agama, serta tidak diskriminatif terhadap kelompok atau individu mana pun" (yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan), ketahanan pangan didefinisikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Faktor lain yang memengaruhi ketahanan pangan adalah lingkungan dan sifat kepekaan cuaca dari beberapa komoditas pertanian.

Praktik pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim akan merugikan petani dan konsumen, terutama mereka yang tinggal di daerah berpendapatan rendah, kecuali jika kebijakan pangan yang tangguh diberlakukan untuk menanggulangi dampak tersebut. Pemerintah melakukan intervensi di banyak bidang produksi pertanian untuk memastikan ketahanan pangan karena berbagai faktor, termasuk komoditas pangan yang rusak, kurangnya lahan produksi yang sesuai untuk perikanan, infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung pertanian, dan pengelolaan tanaman yang buruk sebelum dan sesudah panen. Konsumsi pangan, terutama beras, yang mencapai 124 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2018, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk Indonesia.

Dengan demikian, memastikan ketahanan pangan di berbagai bidang hasil pertanian sangat penting bagi pembangunan jangka panjang Indonesia. Sebagai daerah pertanian yang menjanjikan, Provinsi Banten sedang berjuang untuk memenuhi permintaan pangan sebagai akibat dari perubahan infrastruktur transportasi, industri, dan perkantornya. Ketahanan pangan di daerah tersebut terancam oleh kekurangan lahan pertanian ini. Sebaliknya, industri pertanian di Kabupaten Pandeglang cukup kuat karena melimpahnya sumber daya alam di daerah tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, keanekaragaman, produktivitas, dan nilai tambah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah membuat program revitalisasi pertumbuhan pertanian. Namun karena pengembangan padi sawah yang belum efisien, pertanian tanaman palangwija skala kecil, dan kurangnya intensifikasi di daerah kering atau lahan basah, pendekatan ini menurunkan produktivitas pertanian, khususnya padi. Karena penangkapan ikan merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pandeglang, hal ini menyebabkan meluasnya kemiskinan.

Persoalan lain yang perlu terus dipantau adalah stabilitas harga pangan. Jika tanaman pokok seperti beras, jagung, dan umbi-umbian tidak diproduksi, kesenjangan ketahanan pangan dapat melebar. Penyelesaian persoalan produksi ketahanan pangan di sektor pertanian memerlukan keterlibatan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. Untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan pangan tersedia, diproduksi, disimpan, didistribusikan, dapat diakses, dikonsumsi, berkualitas tinggi, dan bebas dari kontaminan berbahaya. Peneliti tertarik untuk mendalami topik ini lebih jauh karena, mengingat sejarah permasalahannya, "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pandeglang (Studi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang)"

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif data kualitatif. Moleong (2007:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena yang diteliti (persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan sebagainya) secara komprehensif dengan menggunakan bahasa deskriptif dalam situasi alamiah yang unik dan berbagai prosedur ilmiah. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang menjadi lokasi penelitian. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai daerah yang aman pangan. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan di lapangan berdasarkan teori peran pemerintah menurut Bintoro (2009:19) yang menyatakan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengintervensi pengembangan kegiatan pembangunan masyarakat, yaitu melalui operasi langsung dan pengendalian langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bidang prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2016–2021/2021/2021, sesuai kekhasan daerah, adalah meningkatkan ketersediaan pangan, menggenjot distribusi pangan, mempercepat diversifikasi pangan, dan memantau ketahanan pangan segar. Terciptanya ketahanan pangan merupakan istilah umum untuk sejumlah upaya terkait yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membantu masyarakat mencapai potensi sosial, budaya, dan ekonomi mereka secara penuh. Penelitian ini akan difokuskan pada dua aspek yang dianalisis Bintoro dari sudut pandang tentang peran pemerintah (2009:19). "Operasi Langsung" dan "Pengendalian Langsung" merupakan dua cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk terlibat dalam melakukan inisiatif pembangunan masyarakat..

#### **Operasi Langsung**

Setiap orang mempunyai hak yang melekat untuk memperoleh gizi yang cukup, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif di Pandeglang tidak mungkin tercapai tanpa ketahanan pangan, yang pada gilirannya tidak mengorbankan keyakinan agama atau budaya. Dengan memanfaatkan sumber daya, lembaga, dan budaya lokal, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa pangan yang cukup, aman, bermutu tinggi, dan bergizi seimbang tersedia, terjangkau, dan terpenuhi pada tingkat nasional dan daerah. Menurut PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/10, yang membahas Ketahanan Pangan SPM di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pangan

Kabupaten Pandeglang akan bekerja untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan mengoordinasikan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi SPM. Akses terhadap distribusi pangan, keragaman sumber pangan, pengelolaan kerawanan pangan, serta ketersediaan dan cadangan pangan merupakan empat pilar yang menopang ketahanan pangan SPM. Namun, dari sudut pandang praktis, jelas terlihat bahwa pemerintah masih terlibat dalam banyak perilaku pemborosan, khususnya dalam industri jasa makanan. Organisasi masyarakat dan petani telah mengeluh kepada Dinas Pangan tentang rendahnya biaya produksi pangan, terbatasnya akses terhadap benih dan pupuk, serta minimnya lahan yang tersedia, tetapi lembaga tersebut belum memberikan tanggapan. Pandeglang Selatan mengandalkan pertanian untuk sebagian besar pasokan pangannya, sehingga pemerintah dan organisasi lain harus bekerja sama untuk membantu kelompok tani dalam memenuhi permintaan infrastruktur dan fasilitas produksi. Meskipun Dinas Pangan telah mengawasi biaya pangan strategis, mereka masih belum memberikan analisis, peta distribusi, atau temuan penelitian yang dapat diandalkan tentang harga dan distribusi pangan. Ada potensi bagi organisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya mereka dalam mengejar distribusi pangan yang stabil dan lokasi pusat pangan. Karena banyak kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, kegiatan langsung tidak dapat dianggap cukup untuk mempertahankan ketahanan pangan di Pandeglang Selatan.

### **Pengendalian Langsung**

Terdapat sejumlah isu strategis yang dihadapi Indonesia, termasuk perubahan iklim, krisis energi dan pangan, meningkatnya biaya pangan dan energi, serta ekspansi demografi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Selatan telah menyusun program pengembangan ketahanan pangan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Program ini terbagi dalam tiga subsistem, yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Ketahanan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan merupakan tujuan dari inisiatif sosial, budaya, dan ekonomi yang digagas oleh lembaga-lembaga tersebut. Dengan tujuan untuk mendorong dan mengoordinasikan pengembangan ketahanan pangan daerah, maka disusunlah Rencana Strategis Pelayanan Pangan 2016–2021/2001. Rencana ini merupakan bagian dari sejumlah rencana daerah, seperti rencana Bupati/Wakil Bupati, Provinsi Banten, Kementerian Pertanian, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan pengembangan ketahanan pangan harus mengutamakan penanganan ketahanan pangan dan pertanian, kemiskinan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan kerja sama antardaerah, di antara berbagai tantangan strategis lainnya. Dinas Pangan Kabupaten Pandeglang Selatan telah membangun lumbung pangan dan mengoptimalkan lahan pekarangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Inisiatif ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam menstabilkan pasokan pangan, memperkuat lumbung pangan sehingga dapat menggerakkan ekonomi pedesaan, menyediakan pendapatan bagi keluarga nelayan, dan memastikan ketahanan pangan di rumah dengan memastikan setiap orang memiliki cukup makanan. Dinas Pangan Pandeglang Selatan ternyata belum menjalankan rencana strateginya, menurut studi lapangan. Ada kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran untuk hasil pertanian, dan petani serta masyarakat secara keseluruhan kesal dengan kelangkaan sumber daya seperti benih, pupuk, dan lahan pertanian. Namun, operasi pengendalian langsung Dinas Pangan Pandeglang Selatan masih terpusat; misalnya, penilaian pasar terhadap pasokan dan harga pangan adalah satu-satunya yang dilakukan. Infrastruktur, pelatihan, dan promosi produksi lokal sebagai komoditas pangan unggulan adalah cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat sumber daya lokal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu berinvestasi dalam

infrastruktur, memberikan pelatihan, dan mempromosikan produk lokal sebagai komoditas pangan yang menguntungkan. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pangan Pandeglang Selatan telah gagal melaksanakan strateginya untuk menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan di daerah tersebut, sesuai dengan teori pengendalian langsung Bintoro (2011:19). Diperlukan program pembangunan ketahanan pangan yang lebih efisien dan terukur karena upaya pemerintah untuk melakukan sentralisasi belum menjangkau sentra-sentra produksi pangan di pedesaan.

### **Faktor-Faktor Operasi Langsung dan Pengendalian Langsung**

Keberhasilan Dinas Pangan Kabupaten Pandeglang Selatan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan sangat bergantung pada kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya. Dalam jangka panjang, akan terdapat peluang dan tantangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian pangan di bidang distribusi, penyediaan cadangan pangan, diversifikasi konsumsi, penanganan ketahanan pangan, kelembagaan terkait ketahanan pangan, dan pengelolaan ketahanan pangan. Apabila suatu daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal, maka dapat dipastikan seluruh warganya akan memperoleh pangan yang cukup, aman, halal, dan bermutu. Hal ini disebut ketahanan pangan di tingkat daerah. Kerawanan pangan dan kemiskinan saling berkaitan erat. Jika angka kemiskinan terus meningkat, maka akan semakin banyak masyarakat di lingkungan tersebut yang mengalami kelaparan. Wilayah pedalaman dan pesisir merupakan mayoritas kecamatan prioritas 1 yang merupakan kecamatan dengan risiko kerawanan pangan dan gizi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya ketergantungan masyarakat miskin di wilayah tersebut terhadap bahan pangan pokok impor. Penduduk yang tinggal di daerah pedesaan masih menjadi bagian terbesar dari penduduk miskin. Prevalensi kerawanan pangan di daerah pedesaan lebih tinggi karena tingginya angka kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, yang mungkin masih menjadi perhatian di daerah tersebut, peneliti harus memahami faktor atau tantangan yang terkait dengan pengelolaan kerawanan pangan di Pandeglang Selatan. Menurut wawancara peneliti, kerawanan pangan disebabkan oleh kurangnya produksi lokal (seperti beras) dan sistem pengelolaan pangan masyarakat yang belum berkembang. Saat ini, terdapat kekurangan staf penyuluh lapangan, fasilitas yang memadai, dan potensi sumber daya lokal di sektor pengembangan dan infrastruktur pangan.

### **KESIMPULAN**

Kabupaten Pandeglang Selatan kaya akan potensi pertanian dan sumber daya alam lainnya, sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk proyek pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pangan Kabupaten Pandeglang Selatan belum memiliki peran yang memadai dalam menjamin ketahanan pangan. Salah satu contohnya adalah kurangnya operasi langsung secara berkala ke sentra-sentra produksi pangan di daerah pedesaan atau perkotaan. Keluhan masyarakat dan organisasi petani tentang aksesibilitas sumber daya seperti benih, pupuk, dan lahan pertanian menjadi salah satu penyebabnya. Banyak kebutuhan pangan masyarakat yang belum terpenuhi, sehingga muncul persepsi bahwa permasalahan pangan di Pandeglang Selatan masih pelik. Pengelolaan Langsung Dalam upaya untuk mencegah potensi kekurangan pangan, Dinas Pangan mulai mengimpor beras dari daerah lain. Sebaliknya, Rencana Strategis Dinas Pangan tahun 2016–2021/2021 belum memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Desa-desa dan kelompok masyarakat rawan pangan di Kabupaten Pandeglang Selatan menghadapi tantangan dalam mencapai dan mempertahankan kemandirian pangan karena kurangnya pelatihan dan

sumber daya bagi penyuluh pertanian dan asisten lapangan, pendanaan yang tidak memadai untuk infrastruktur pedesaan yang penting, dan faktor-faktor lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anomin 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang Ketahanan Pangan.
- Anonim 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tentang Ketahanan Pangan Nasional.
- Anonim 2012, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Darwanto, Dwidjono H. 2012, Konsep Ketahanan Pangan. MMA-UGM Yogyakarta, Ilmu Pertanian.
- Djopari dan Solihah, Ratna 2008, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Khambali, I 2016, Manajemen Bencana. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Koentjaraningrat, Erlangga 2009, Pengantar Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipt
- Kuncoro, Mudjarad 2004, Otonomi Daerah & Pembangunan. Jakarta: Penerbit
- Lauma, R., Pangemanan, S., & Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Moehar, Daniel 2004, Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. 2005, Kybernologi: Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nurman 2016, Konsep Pemerintahan. Jakarta Pt. Raja Grafindo.
- PPK-LIPI 2012, Ketahanan Pangan. Seri Penelitian PPK-LIPI No. 56/2012. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan\_LIPI.
- Purwaningsih, dkk. 2010. "Analisis Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara (analisis data Susenas 2008)". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Jurnal Eco-Regional FE UNSOED*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2010.
- Rivai, Veithzal 2004, Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono 2005, Penerapan Good Governance. Yogyakarta : LB Laks Bang.
- Sarwono, Sarlito Wirawan 2016, Konsep Peran Turunan dan Implikasinya. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P. 2012, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono 1980, Sosiologi: Suatu Pengantar. Bandung: Armico.
- Suryabrata, Sumadi 2016, Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjokroamidjojo, Bintoro 2006, Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, LP3ES.